

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Anonym, 2015, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Desa di Indonesia*, Marzha Tweedo.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2015, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Didik G Suharto, 2016, *Membangun Kemandirian Desa (Perbandingan UU No. 5/1979, UU No. 22/1999, & UU No. 32/2004 Serta Perspektif UU No. 6/2004)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Didit Herlianto, 2017, *Manajemen Keuangan Desa (Berbasis Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa)*, Gosyeng Publishing, Yogyakarta.
- HAW Widjaja, 2002, *Pemerintahan Desa/Marga*, PT . RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- , 2003, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Mashuri Maschab, 2013, *Politik Pemerintahan Desa di Indoneisa*, Polgov UGM, Yogyakarta.
- Rahmah Yabbar dan Hamzah, Ardi, 2015, *Tata Kelola Pemerintahan Desa*, Pustaka, Surabaya.
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Sumber Saporin, 2009, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Taliziduhu Ndraha, 1991, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Jakarta Bumi Aksara.

Umar Nain, 2012, *Perangkat Desa dan Pengangkatan Sekdes Menjadi PNS*, Pustaka Refleksi, Makasar.

-----, 2017, *Relasi Pemerintah Desa dan Supradesa Dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa*, Pusataka Pelajar, Yogyakarta.

Yumiko M Prijono dan Prijono Tjiptoherijanto, 2012, *Demokrasi Di Pedesaan Jawa*, Kosakata Kita, Jakarta.

Zudan Arif Fakhrulloh, 2014, *Hukum Indonesia Dalam Berbagai Perspektif*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Peraturan Bupati Brebes Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2018.

C. Lain-lain

Cipnal, 2012, *Calon Bupati Yang Sukses Bangun Desa*, Majalah *Suara Desa* Edisi 07.

M. Iwan Satriawan, 2013, *Politik Hukum Pemerintahan Desa Di Indonesia*, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7 No. 2, Mei-Agustus 2013.

Saiful, 2014, *Eksistensi Peraturan Desa Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011*, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 6 Volume 2, Tahun 2014.

D. Internet

<http://www.voaislam.com/read/worldanalysis/2018/03/01/56300/kehebatan-penetapan-anggaran-dalam-sistem-islam/>, Pada Tanggal 13 Desember 2018, Pukul 21.48 WIB.

<https://politikislam123.wordpress.com/2011/02/04/apbn-baitul-mal/>, Pada Tanggal 13 Agustus 2018, Pukul 22.07 WIB.

https://abdulkadirarno.wordpress.com/2016/10/13/penyusunan-anggaran-perspektif-fiqhi-anggaran-hukum-ekonomi-syariah/#_ftn3, Pada Tanggal 12 Desember 2018, Pukul 1.44 WIB.